

# Menalar Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan

Oleh:

**Gede Agus Siswadi**

STAHN Jawa Dwipa, Mahasiswa S3 Universitas Gadjah Mada

Email: [gedeagussiswadi@gmail.com](mailto:gedeagussiswadi@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article History:

Naskah Masuk : 2 Januari 2025

Naskah Direvisi : 20 Januari 2025

Naskah Disetujui : 21 Januari 2025

Tersedia Online : 23 Januari 2025

### Keywords:

Policy, Mendikdasmen, Philosophy of Education

### Kata Kunci:

Kebijakan, Mendikdasmen, Filsafat Pendidikan



This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Samsara Institute

## ABSTRACT

*This research aims to examine the policy of the Minister of Primary and Secondary Education (Mendikdasmen) of the Republic of Indonesia from the perspective of educational philosophy. This policy is evaluated with a focus on two main principles, namely quality education and education for all, as a manifestation of the ideals of creating an inclusive, relevant and equitable education system. A qualitative method with a literature study approach and philosophical analysis was used to understand the philosophical underpinnings of the policy. Data were obtained from official documents, educational philosophy literature, and text analysis of Mendikdasmen speeches and public statements. The results show that Mendikdasmen policy reflects key principles in educational philosophy, such as pragmatism, humanism, and reconstructionism. The policy is not only oriented towards developing the quality of education through improving teachers' competencies and providing facilities, but also emphasises the importance of equal access for all groups of society, including marginalised children. This research concludes that the Mendikdasmen policy is in line with philosophical values in creating education as a tool for individual empowerment and social transformation.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan. Kebijakan ini dievaluasi dengan fokus pada dua prinsip utama, yaitu pendidikan bermutu dan pendidikan untuk semua, sebagai wujud dari cita-cita menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkeadilan. Metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis filosofis digunakan untuk memahami landasan filosofis yang melandasi kebijakan tersebut. Data diperoleh dari dokumen resmi, literatur filsafat pendidikan, serta analisis teks pidato dan pernyataan publik Mendikdasmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Mendikdasmen mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam filsafat pendidikan, seperti pragmatisme, humanisme, dan rekonstruksionisme. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru dan penyediaan fasilitas, tetapi juga menekankan pentingnya akses

setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk anak yang terpinggirkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Mendikdasmen sejalan dengan nilai-nilai filosofis dalam menciptakan pendidikan sebagai alat pemberdayaan individu dan transformasi sosial.

---

## I. PENDAHULUAN

Langkah panjang dalam proses kebijakan selalu bermuara pada implementasi, yang menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, kebijakan yang dirancang dengan cermat, baik melalui kajian teoretis, analisis data, maupun dialog antar pemangku kepentingan, hanya akan berfungsi jika diterapkan dengan konsistensi dan komitmen. Proses implementasi tidak hanya memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan, tetapi juga menjadi tahap di mana kebijakan tersebut diuji efektivitasnya. Bahkan formulasi kebijakan yang dirancang dengan sangat baik dapat kehilangan maknanya jika tidak ditindaklanjuti dengan langkah implementasi yang terukur, strategis, dan berorientasi pada hasil nyata.

Sebaliknya, kebijakan yang mungkin dianggap sederhana atau tidak sempurna dapat memberikan dampak positif jika diterapkan dengan sungguh-sungguh (Dewi, 2016). Implementasi yang baik dapat mengatasi kelemahan dalam formulasi kebijakan melalui adaptasi dan inovasi di lapangan. Hal ini menegaskan pentingnya kemampuan eksekusi dalam setiap tahap kebijakan. Dalam dunia pendidikan, contohnya, pelaksanaan program pembelajaran meskipun dengan keterbatasan sarana tetap dapat menghasilkan manfaat nyata apabila ada komitmen tinggi dari pelaksana di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, fokus pada implementasi menjadi kunci untuk memastikan kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga membawa perubahan konkret (Baro'ah, 2020).

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari keseluruhan proses pembuatan kebijakan (*policy making process*), yang secara sistematis terdiri atas tahapan-tahapan yang saling terkait. (Hasbullah, 2015) menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah sebuah proses politik yang melibatkan berbagai aktivitas dan kepentingan politis, di mana setiap tahap menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Proses ini dimulai dari penyusunan agenda yang mengidentifikasi masalah prioritas, dilanjutkan dengan formulasi kebijakan yang menghasilkan solusi strategis, adopsi kebijakan sebagai keputusan resmi, implementasi kebijakan untuk pelaksanaannya di lapangan, hingga penilaian kebijakan yang mengevaluasi keberhasilannya. Implementasi menjadi titik krusial dalam proses ini karena menjadi tahap realisasi dari gagasan kebijakan yang telah dirancang.

Tahapan implementasi tidak hanya menjadi penghubung antara perumusan kebijakan dan hasil yang diinginkan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan proses politik secara keseluruhan (Junaid, 2016). Dalam implementasi, kebijakan yang telah disahkan diuji dalam konteks nyata melalui pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan program, serta pengawasan dan penyesuaian sesuai kondisi di lapangan. Jika tahapan ini berjalan dengan baik, maka kebijakan memiliki peluang besar untuk mencapai tujuannya, meskipun pada tahap sebelumnya terdapat keterbatasan atau kelemahan. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya merupakan bagian dari proses politik, tetapi juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Siswadi, 2024c).

Kebijakan pendidikan merupakan cerminan dari visi dan arah pembangunan bangsa, karena pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing global (Siswadi, 2023b). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia memegang peran penting dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak pada sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, menalar kebijakan Mendikdasmen bukan hanya soal menilai kebijakan tersebut secara teknis, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Perspektif filsafat pendidikan menjadi relevan karena menawarkan landasan konseptual untuk mengevaluasi apakah kebijakan pendidikan mampu mencerminkan tujuan ideal pendidikan.

Filsafat pendidikan, sebagai cabang filsafat yang mengeksplorasi makna, tujuan, dan metode pendidikan, membantu memberikan kerangka pemikiran yang kritis dan sistematis terhadap kebijakan pendidikan (Siswadi, 2023a). Dalam hal ini, pendekatan filosofis memungkinkan penelaahan terhadap kebijakan Mendikdasmen dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi terkait dengan realitas pendidikan yang ingin dicapai, epistemologi menyangkut metode dan pengetahuan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan aksiologi membahas nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada kebijakan (Siswadi, 2024a). Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks kebijakan pendidikan yang sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial.

Melalui perspektif filsafat pendidikan, maka diharapkan akan dapat menalar apakah kebijakan Mendikdasmen benar-benar merefleksikan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan Mendikdasmen Republik Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan, guna memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang tidak

hanya bagi pengembangan teori pendidikan, tetapi juga bagi praktik kebijakan pendidikan di Indonesia. Selain itu, melalui analisis ini, diharapkan muncul rekomendasi strategis untuk memperkuat kebijakan pendidikan agar lebih relevan, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis yang ideal.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis filosofis untuk menelaah kebijakan Mendikdasmen dalam perspektif filsafat pendidikan. Sumber data dari penelitian ini meliputi dokumen resmi pemerintah, seperti kebijakan dan peraturan dari Kementerian Pendidikan, serta literatur ilmiah terkait filsafat pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, kajian literatur, dan analisis teks dari pidato atau pernyataan publik Mendikdasmen. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan interpretasi filosofis, mengkaji sejauh mana kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip dalam filsafat pendidikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola analisis data dari Miles dan Huberman yakni dari data koleksi, reduksi data, display data dan penyimpulan data.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen)

Kebijakan pendidikan adalah seperangkat aturan atau pedoman yang dirancang untuk mengatur, mempermudah, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan bertujuan untuk mendukung perkembangan sistem pendidikan yang inovatif, sehingga dapat menciptakan proses belajar yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Junaid, 2016), kebijakan pendidikan memainkan peran strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yang meliputi pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh untuk menjadi individu yang berkarakter, kompeten, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Pencapaian tujuan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan faktor-faktor yang saling terkait dalam sistem pendidikan. (Dewi, 2016) menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut mencakup pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan. Setiap faktor ini memiliki peran vital yang saling mendukung dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang optimal. Misalnya, pendidik yang kompeten akan mampu membimbing peserta didik dengan metode yang tepat, sementara lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.

Pendidikan, pada dasarnya, adalah sebuah sistem yang terintegrasi dan saling berkaitan antara berbagai subsistem (Rusmana, 2020). Jika salah satu subsistem mengalami

kendala, maka seluruh sistem pendidikan akan terpengaruh dan fungsi pendidikan tidak akan berjalan secara maksimal. Sebagai contoh, kurangnya alat pendidikan yang memadai dapat menghambat proses pembelajaran, sementara tujuan pendidikan yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dalam penyelenggaraan pendidikan (Syafri et al., 2018). Oleh karena itu, harmonisasi setiap komponen dalam sistem pendidikan sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pentingnya kebijakan pendidikan yang responsif dan adaptif menjadi krusial dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Dengan kebijakan yang dirancang secara sistematis, sistem pendidikan dapat dikelola secara efisien dan menciptakan sinergi di antara semua elemen yang terlibat. Hal ini memungkinkan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran formal, tetapi juga sebagai wahana untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pengambilan kebijakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam mendesain sistem pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik mengacu pada pendekatan yang melihat peserta didik secara utuh, mencakup perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (Bernadib, 1997). Kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan hendaknya dapat memastikan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek akademik semata, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup, karakter, dan nilai-nilai moral yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Hamdi et al., 2022). Hal ini sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan sikap positif terhadap lingkungan. Pentingnya pengambilan kebijakan yang tepat juga terletak pada kemampuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan.

Pendidikan bermutu untuk semua merupakan salah satu kebijakan penting yang diusung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis siswa. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Upaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur sekolah di daerah terpencil, penyediaan tenaga pendidik berkualitas, dan distribusi fasilitas pendidikan yang merata. Selain pemerataan akses, kebijakan ini juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh jenjang, terutama di pendidikan dasar dan menengah. Desain pendidikan bermutu mencakup perbaikan kurikulum yang relevan, penerapan metode pembelajaran inovatif, dan evaluasi pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa. Hal ini penting agar pendidikan tidak hanya

menghasilkan siswa yang mampu memahami materi akademik, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Kebijakan ini menekankan bahwa mutu pendidikan harus menjadi hak setiap individu, bukan hanya kelompok tertentu.

Gambar 1. Regulasi Pendidikan Bermutu

**“Pendidikan Bermutu untuk Semua”**

**Pembukaan UUD 1945**  
...untuk **memajukan** kesejahteraan umum, **mencerdaskan** kehidupan bangsa...

**Undang-Undang Dasar 1945**  
**Pasal 31 ayat 1** Setiap warga negara **berhak** mendapatkan pendidikan  
**Pasal 31 ayat 3** ...meningkatkan **keimanan** dan **ketakwaan** serta **akhlak** mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...

**UU No. 20/2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional  
**Pasal 3** Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta **peradaban bangsa yang bermartabat** dalam rangka **mencerdaskan** kehidupan bangsa...  
**Pasal 5 ayat 1** Setiap warga negara mempunyai **hak yang sama** untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

**UU No. 14/2005** tentang Guru dan Dosen  
**Pasal 8** Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Cuplikan peraturan lain yang terkait:

- UU No. 8/2016** tentang Penyandang Disabilitas
- Perpres No. 87/2017** tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- UU No. 59/2024** tentang RPJPN 2025-2045

**ASTA CITA**  
**Kabinet Merah Putih**  
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sumber: Naskah Pidato Mendikdasmen, 2024

Kebijakan pendidikan bermutu untuk semua memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan pendidikan bermutu yang merata, negara dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut, kebijakan pendidikan bermutu untuk semua dirancang untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan memastikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, pendidikan bermutu tidak hanya menjadi alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945.

Selain itu, prinsip penting mengenai hak atas pendidikan juga tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak

mendapatkan pendidikan". Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, dengan tujuan agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan yang berkualitas. Kebijakan pendidikan bermutu untuk semua sejalan dengan pasal ini, di mana negara bertanggung jawab memastikan bahwa setiap warga negara, terutama anak-anak, dapat menikmati pendidikan yang memadai. Selain hak atas pendidikan, Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 juga menekankan pentingnya pendidikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya berorientasi pada pengembangan intelektual, tetapi juga harus membentuk karakter dan moral peserta didik. Pendidikan yang bermutu harus mencakup penguatan nilai-nilai agama, etika, dan akhlak mulia, agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan rasa tanggung jawab sosial.

Selain amanat dalam UUD 1945, kebijakan pendidikan bermutu untuk semua juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis tidak hanya untuk mencetak individu yang cerdas dan kompeten, tetapi juga untuk membangun karakter dan nilai-nilai kebangsaan yang luhur. Fungsi ini sejalan dengan kebutuhan menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 5 ayat 1 UU No. 20/2003 lebih lanjut menegaskan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Pernyataan ini memperkuat prinsip kesetaraan dalam pendidikan, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Dengan demikian, pendidikan bermutu untuk semua bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi juga tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan pendidikan yang mendukung akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 2. Skema Pendidikan Indonesia Menuju Bangsa Cerdas dan Maju



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia memiliki visi untuk menjadikan bangsa Indonesia cerdas dan maju melalui dua prinsip utama: pendidikan bermutu dan pendidikan untuk semua. Pendidikan bermutu adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima pembelajaran yang relevan, bermakna, dan berkualitas. Dalam kerangka ini, pembelajaran adaptif menjadi fokus penting, di mana materi dan metode pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan potensi unik setiap siswa. Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga membangun karakter bangsa melalui pendidikan yang terintegrasi dengan kehidupan nyata. Oleh karenanya, beberapa prinsip yang ditekankan oleh Mendikdasmen yakni melihat secara utuh terkait dengan lingkungan sosial budaya yang merupakan fondasi dalam membangun pendidikan bermutu. Dengan mempertimbangkan keberagaman budaya, agama, dan nilai-nilai lokal, pendidikan Indonesia diarahkan untuk menciptakan generasi yang toleran, inklusif, dan memahami pentingnya harmoni sosial.

Selain itu, keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Guru dan tenaga pendidik yang profesional memegang peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas (Muhson, 2004). Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis teknologi, program sertifikasi, dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, kesejahteraan guru juga menjadi prioritas, dengan upaya untuk meningkatkan gaji, insentif, dan jaminan sosial yang memadai. Guru yang kompeten dan sejahtera akan lebih termotivasi untuk mendidik generasi muda dengan sepenuh hati (Bagou, 2020). Selanjutnya, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi elemen penting dalam mendukung skema pendidikan menuju bangsa yang maju. Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang layak,

laboratorium, perpustakaan, serta akses internet yang merata di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya itu, upaya untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah tertinggal memiliki fasilitas yang setara dengan sekolah di perkotaan juga menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu siswa mencapai potensi terbaiknya.

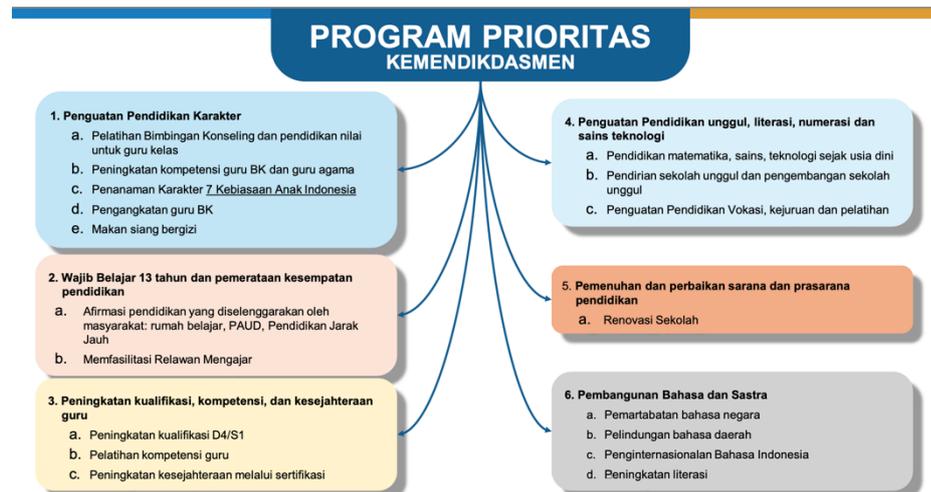
Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah mengenai kebijakan Mendikdasmen yang memfokuskan pada upaya pendidikan untuk semua. Pendidikan harus menjadi wahana untuk mengembangkan talenta unggul yang dimiliki setiap individu (Siswadi, 2024b). Setiap anak memiliki potensi unik yang jika dikembangkan dengan optimal, dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa (Siswadi, 2024d). Sistem pendidikan harus dirancang untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis sejak dini. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis kompetensi sangat penting untuk memastikan setiap siswa memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, baik dalam bidang teknologi, seni, maupun ilmu sosial (Santo, 2008). Pengembangan talenta unggul juga membutuhkan kolaborasi erat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.

Pendidikan untuk semua juga harus memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang yang termarginalkan. Layanan pendidikan inklusif harus memberikan akses yang setara bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan guru untuk mendukung pembelajaran inklusif, serta kurikulum yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan siswa. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga sarana pemberdayaan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Berikutnya, pembiayaan pendidikan yang berbasis afirmasi merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan dalam akses pendidikan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan alokasi dana pendidikan yang memprioritaskan kelompok kurang mampu, daerah terpencil, dan kelompok termarginalkan. Program beasiswa, subsidi pendidikan, serta dukungan finansial lainnya dapat menjadi langkah strategis untuk membuka peluang pendidikan bagi anak yang memiliki latar belakang keluarga tidak mampu. Dengan pembiayaan afirmatif, pendidikan dapat menjadi alat mobilitas sosial yang efektif dan menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua individu. Selanjutnya, ketersediaan layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah merupakan prasyarat untuk mewujudkan pendidikan untuk semua. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pengadaan guru berkualitas di wilayah terpencil, serta

distribusi materi pembelajaran yang memadai. Pemerataan layanan pendidikan ini harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi digital untuk menjembatani kesenjangan geografis. Dengan memastikan bahwa setiap individu, di mana pun berada, memiliki akses ke pendidikan berkualitas, sehingga hal tersebut akan dapat menciptakan generasi yang lebih setara dan siap menghadapi tantangan global.

Gambar 3. Program Prioritas Kemendikdasmen



Sumber: Naskah Pidato Mendikdasmen, 2024

Kemendikdasmen dalam menjalankan kebijakannya, maka ada beberapa hal yang menjadi program prioritas yakni penguatan pendidikan karakter melalui pelatihan bimbingan konseling. Program ini tentunya bertujuan untuk memperkuat kemampuan guru dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan yang dihadapi siswa, baik secara akademik maupun sosial. Guru kelas diberikan keterampilan dalam menyampaikan nilai-nilai positif yang mendukung pembentukan karakter siswa, seperti tanggung jawab, kerja sama, dan kedisiplinan. Dengan pelatihan ini, diharapkan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengutamakan pencapaian akademis, tetapi juga perkembangan moral dan sosial yang sehat. Selanjutnya, guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru agama memiliki peran krusial dalam membentuk karakter siswa, sehingga peningkatan kompetensi dari seorang guru BK dan guru agama menjadi sangat penting. Melalui pelatihan dan peningkatan kemampuan, baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan, guru BK dan guru agama dapat memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter anak didik. Guru BK diharapkan mampu memberikan pendampingan secara holistik, sementara guru agama dapat menanamkan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi karakter yang kuat. Program ini juga melibatkan kolaborasi antara guru BK dan guru agama dalam menciptakan sinergi pembelajaran karakter yang lebih efektif.

Selain dari hal tersebut penguatan pendidikan karakter juga dilakukan melalui penanaman tujuh kebiasaan positif yang dikenal dengan “7 Kebiasaan Anak Indonesia”.

Kebiasaan-kebiasaan ini meliputi disiplin, tanggung jawab, kerja sama, peduli, jujur, kreatif, dan mandiri. Melalui berbagai program pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar kelas, anak-anak diharapkan dapat menginternalisasi kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kebiasaan ini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi pada masyarakat secara positif. Selanjutnya, pengangkatan guru BK yang memadai di setiap sekolah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan emosional dan sosial yang diperlukan. Guru BK yang berkualitas dapat memberikan bimbingan yang tepat dalam membentuk karakter dan mengatasi masalah personal siswa. Selain itu, program makan siang bergizi juga merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter yang tidak kalah penting. Makanan bergizi mendukung kesehatan fisik siswa, yang pada muaranya akan berpengaruh positif pada konsentrasi dan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran.

Gambar 4. Strategi Kebijakan Kemendikdasmen



Sumber: Naskah Pidato Mendikdasmen, 2024

Hal yang perlu diperhatikan bahwasanya mengenai strategi kebijakan Kemendikdasmen, sebagaimana yang dijelaskan pada gambar di atas yakni berfokus pada partisipasi semesta dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Strategi ini didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2023, Pasal 4 Ayat 6. Tiga pilar utama yang menjadi landasan strategi ini adalah Kebaruan, Kemitraan, dan Keadilan, yang saling mendukung untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Pada konteks kebaruan lebih menekankan pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan dengan mewadahi gagasan kreatif, dan mengutamakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tetap adaptif

terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Pemerintah pusat, daerah, dan desa bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan inovatif, sehingga seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat menikmati manfaat pendidikan yang maju dan kontekstual.

Selanjutnya, pilar kemitraan menggarisbawahi peran kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha/industri, mitra pembangunan, dan masyarakat. Pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersama masyarakat, termasuk orang tua, memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem pendidikan yang sehat. Dunia usaha dan industri dilibatkan untuk memastikan bahwa pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan kemitraan ini, sistem pendidikan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing bangsa. Kemudian, pilar keadilan berfokus pada pembiayaan pendidikan yang adil, penyediaan sarana dan prasarana yang setara, serta tata kelola SDM yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal. Melalui strategi keadilan ini, diharapkan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan, sehingga tercipta generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan global dengan karakter yang kuat dan kompetensi yang unggul.

### **3.2 Kebijakan Mendikdasmen dalam Perspektif Filsafat Pendidikan**

Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat pendidikan serta berupaya memberikan pemecahan masalah di dalamnya (Siswadi, 2024a). Filsafat pendidikan tidak hanya membahas konsep abstrak pendidikan, tetapi juga memberikan landasan teoretis untuk memahami bagaimana manusia belajar, memperoleh pengetahuan, dan mengembangkan dirinya (Kristiawan, 2016). Filsafat pendidikan mengajarkan cara berpikir kritis dan analitis terhadap proses pendidikan. Hal ini mencakup pertanyaan mendasar seperti “Apa tujuan pendidikan?”, “Bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter dan intelektual manusia?”, serta “Apa nilai-nilai yang harus diutamakan dalam pendidikan?” Dengan cara berpikir ini, filsafat pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk perancangan kurikulum, pengajaran, dan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan manusia (Knight, 2004).

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam filsafat pendidikan adalah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan (Siswadi, 2023b). Hal ini tentunya mencakup kajian epistemologi dalam pendidikan, yaitu bagaimana manusia belajar melalui pengalaman, pembelajaran formal, maupun proses sosial (Faiz & Kurniawaty, 2020). Dalam hal ini, filsafat

pendidikan mengevaluasi berbagai teori belajar dan pendekatan pedagogis untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif, yang esensial dalam kehidupan (Siswadi, 2023a). Filsafat pendidikan juga membahas bagaimana pendidikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat (Siswadi, 2022). Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial. Melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai humanis dan inklusif, manusia dapat membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan berperan dalam memberikan panduan etis dan filosofis untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi kekuatan yang memajukan peradaban.

Kebijakan pendidikan dasar dan menengah (Mendikdasmen) yang menekankan pendidikan bermutu dan pendidikan untuk semua merupakan refleksi nyata dari prinsip-prinsip filsafat pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk membentuk individu yang utuh. Pendidikan bermutu berorientasi pada pengembangan karakter, keterampilan berpikir kritis, dan kompetensi praktis, sedangkan pendidikan untuk semua menekankan aspek inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan sosial. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan individu maupun masyarakat.

Pendidikan bermutu, dalam konteks kebijakan Mendikdasmen, melibatkan berbagai aspek seperti peningkatan kualitas pengajaran, perbaikan kurikulum, dan penguatan kompetensi guru. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata siswa sehingga anak dapat menghadapi tantangan dunia modern. Program-program seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum berbasis proyek, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai adalah langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan.

Pendidikan untuk semua, di sisi lain, mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Filsafat pendidikan humanisme menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan seperti pembiayaan afirmatif untuk siswa dari keluarga tidak mampu, program sekolah inklusif, dan penyediaan sarana pendidikan di daerah terpencil mencerminkan prinsip ini. Dengan menyediakan akses yang merata, pendidikan menjadi alat untuk memberdayakan individu dan mengurangi kesenjangan sosial yang masih ada di masyarakat. Dalam perspektif filsafat pendidikan, pendidikan bermutu dan

pendidikan untuk semua tidak bisa dipisahkan. Pendidikan bermutu tanpa akses yang inklusif hanya akan menguntungkan segelintir individu, sedangkan pendidikan untuk semua tanpa memastikan kualitas akan gagal memenuhi tujuan pendidikan itu sendiri. Kebijakan Mendikdasmen yang mengintegrasikan kedua aspek ini adalah wujud dari pendekatan holistik dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana transformasi sosial yang efektif, yang bertujuan untuk mengarahkan semua individu untuk mencapai potensi terbaiknya.

Pendidikan yang bermutu dan inklusif juga memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran dan berkeadilan. Dalam filsafat pendidikan, pendidikan dipandang sebagai alat untuk membangun kesadaran sosial dan etika bersama. Kebijakan seperti penyediaan sekolah yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus, pelatihan guru yang fokus pada pendidikan inklusif, serta adaptasi kurikulum berbasis nilai-nilai kemanusiaan adalah langkah nyata yang mencerminkan filosofi ini. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menjadi proses belajar-mengajar, tetapi juga wadah untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan demikian, kebijakan Mendikdasmen yang menekankan pendidikan bermutu dan pendidikan untuk semua mencerminkan pemahaman mendalam tentang peran pendidikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Melalui kebijakan ini, pendidikan menjadi alat untuk mencetak generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter, sekaligus memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal dalam mengakses haknya atas pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan beradab.

#### **IV. SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam filsafat pendidikan, khususnya pragmatisme, humanisme, dan rekonstruksionisme. Kebijakan tersebut berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan melalui strategi yang menekankan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata, penguatan kompetensi pendidik, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam perspektif filsafat pendidikan, kebijakan ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial dan pembentukan karakter manusia unggul. Namun, pelaksanaan kebijakan membutuhkan penguatan dalam hal keberlanjutan program. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pendidikan terus diarahkan pada pencapaian keadilan pendidikan yang lebih

menyeluruh, dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bagou, D. Y. , & S. A. (2020). Analisis Kompetensi Profesional Guru. *Jambura Journal of Educational Management, Volume 1, Nomor 2, September 2020, Halaman 122-130. Universitas Negeri Gorontalo.*
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu, 4(1), 1063-1073.*
- Bernadib, I. (1997). *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Dewi, R. (2016). Kebijakan Pendidikan ditinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 58-71.*
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 12(2), 155-164.*
- Hamdi, S., Triatna, C., & Nurdin. (2022). Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 7(1), 10-17.*
- Hasbullah, H. M. (2015). *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaid, H. (2016). *Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara Makro dan Mikro terhadap Rumusan Kebijakan Pendidikan Nasional).* Sulesana: *Jurnal Wawasan Keislaman, 7(2), 84-102.*
- Knight, G. R. (2004). *Filsafat Pendidikan: Isu-Isu Kontemporer dan Solusi Alternatif.* Yogyakarta: Idea.
- Kristiawan, M. (2016). *Filsafat Pendidikan, The Choice is Yours.* Valia Pustaka.
- Muhson, A. (2004). Meningkatkan Profesionalisme Guru: Sebuah Harapan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 2(1).*
- Rusmana, F. A. I. (2020). *Memerdekakan Siswa Melalui Pendidikan: Relevansi Konsepsi Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara.*
- Santo, J. De. (2008). *Pengalaman dan Pendidikan. Terjemahan dari Experience and Education John Dewey.* Yogyakarta: Kepel Press.
- Siswadi, G. A. (2022). *Konsep Merdeka Belajar dalam Kurikulum Merdeka ditinjau dari Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya dengan Penguatan Karakter Pelajar Indonesia.* Tesis. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

- Siswadi, G. A. (2023a). Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Agama Hindu Perspektif Filsafat Pendidikan Progresivisme. *Japam: Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, 3(01), 23–32.
- Siswadi, G. A. (2023b). *Ragam Persoalan Pendidikan di Indonesia dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan*. *Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu*, 5(1), 20-36.
- Siswadi, G. A. (2024a). *Mengungkap Filsafat Pendidikan di Balik Kurikulum Merdeka*. Badung: Nilacakra Publishing House.
- Siswadi, G. A. (2024b). *Paradigma Pendidikan Kritis Paulo Freire dan Relevansinya dalam Pengembangan Pendidikan Humanis di Indonesia*. *Japam (Jurnal Pendidikan Agama)*, 4(2), 176-187.
- Siswadi, G. A. (2024c). *Pedagogi Eksistensial Humanistik dalam Pandangan Jean Paul Sartre dan Refleksi atas Kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia*. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*, 15(1), 57-77.
- Siswadi, G. A. (2024d). *Sekolah Bukan Mesin Pencetak Manusia Pekerja*. Kota Solok Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Syafril, Eldarni, & Rahmi, U. (2018). *Teknologi Pendidikan: Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.